



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



SELASA PON

3 SEPTEMBER 2024 (28 SAPAR 1958 / TAHUN LXXIX NO 321)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

JAMIN KEAMANAN PARA SAKSI Pansus Angket Haji Gandeng LPSK

JAKARTA (KR) - Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka.

Juru Bicara Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan hal itu untuk mendukung kelancaran tugas selama proses penyelidikan. Sejumlah saksi yang telah dipanggil pansus, menurutnya, berasal dari unsur pemerintah maupun dari unsur nonpemerintah.

"LPSK akan mendampingi proses investigasi penyelenggaraan haji sampai penyelidikan yang dilakukan pansus angket haji DPR tuntas," kata Wisnu saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/9).

* Bersambung hal 7 kol 4

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:41	14:59	17:40	18:49	04:23

Selasa, 3 September 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Analisis Sanctuary Indonesia

Dr Sumbo Tinarbuko



MOMENTUM perayaan hari kemerdekaan Indonesia 2024, diselenggarakan di bawah naungan payung tahun politik. Sebuah tahun berlangsungnya pemilu serentak. Diawali agenda pesta demokrasi untuk memilih presiden, wakil presiden dan anggota dewan. Kemudian jelang akhir tahun politik, diselenggarakan pilkada. Salah satu wahana politik untuk mencoblos calon bupati, walikota serta gubernur.

Ketika sebuah tahun di-branding dan direkatkan label politik, maka nuansa tahun itu menjadi lekat dengan sepak terjang partai politik. Warna jenama parpol berikut ideologinya berkumandang di seluruh Indonesia. Semua gerak, lagu, narasi hidup dan kehidupan disetel dalam irama politik praktis. Tafsirnya?

* Bersambung hal 7 kol 1

Bukan untuk Lindungi Kejahatan Kejagung Tunda Proses Hukum Cakada

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan instruksi Jaksa Agung soal penundaan proses hukum calon kepala daerah (cakada) yang mengikuti Pilkada 2024, bukan untuk melindungi tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Penundaan proses hukum itu bertujuan untuk menjaga objektivitas proses demokrasi yang berjalan. Supaya tidak ada

kampanye hitam, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan suatu isu untuk menjatuhkan calon yang lain.

"Saya mau tegaskan, yang pertama bahwa bukan dimaksudkan akan melindungi kejahatan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (2/9).

Harli memastikan bahwa Kejagung akan melanjutkan proses hukum kepala daerah yang bermasalah setelah pilkada berakhir. "Setelah itu (Pilkada 2024), tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan," tegasnya.

Diketahui, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Opti-

malisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. INSJA tersebut diterbitkan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan memorandum Jaksa Agung Nomor 128 tentang optimalisasi

* Bersambung hal 7 kol 1

ANGGOTA DPRD DIY JALANI PELANTIKAN Sultan: Bisa Bekerja Sama Kawal Aspirasi

YOGYA (KR) - Sebanyak 55 anggota DPRD DIY terpilih, resmi dilantik, Senin (2/9). Pelantikan dilangsungkan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD DIY Masa Jabatan 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY.

Dalam agenda tersebut sekaligus mengesahkan pimpinan DPRD DIY sementara, yakni Nuryadi dari PDI Perjuangan (PDIP) dan Budi Waljiman dari Partai Gerindra. Pemilihan keduanya itu berdasarkan perolehan kursi di DPRD DIY periode 2024-2029.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap para anggota DPRD DIY yang baru dilantik dapat saling bekerja sama,

termasuk dengan pemerintah daerah untuk mengawal aspirasi rakyat.

"Terkait di DIY ada masalah apa, itu hal teknis yang harus dimusyawarah-

kan di komisi dan antarfraksi. Jadi, kalau pesan-pesan khusus tidak ada. Saling bekerja sama saja dalam mengawal aspirasi masyarakat," ujar Sri Sultan

kepada wartawan.

Gubernur DIY dalam rapat paripurna tersebut membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam poin sambutannya agar

anggota DPRD terpilih hendaknya menempatkan

* Bersambung hal 7 kol 4



Gubernur DIY Sultan HB X menyalami para Anggota DPRD DIY Periode 2024-2029 yang baru dilantik.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● KAMIS 22 Agustus 2024 saya ke mini market di Tegal untuk membeli pembersih wajah. Saat mencari produk tersebut, yang dipasang tidak hanya label harga tetapi terdapat pula label yang berukuran kartu pos. Tulisannya, "Di sini ada CCTV, Iho." Ada juga tulisan "Mau bayar di kasir atau di akhirat?" (Sutono, Harjosari Kidul, Adiwerna Tegal)-d

DPRD DIY DIWARNAI BANYAK ANGGOTA BARU

Nuryadi Yakin Kian Perkuat Kinerja



FORUM DPRD DIY

LIMA tahun sudah anggota DPRD DIY periode 2019-2024 telah mengabdikan diri. Sebuah perjalanan yang tidak ringan, mengingat di masa awal mengabdikan dilanda pandemi Covid-19.

Sebagai wakil rakyat, telah membuktikan ikut mengantarkan kebangkitan ekonomi dan sosial masyarakat DIY melalui keputusan politik yang dihasilkan. Kali ini, ekonomi terus tumbuh dan kemiskinan secara bertahap berkurang.

Periode pengabdian telah berakhir diganti anggota DPRD DIY tahun 2024-2029 hasil Pemilu 12 Februari 2024, dan dilantik, Senin (2/9/2024). Dari 55 anggota DPRD DIY yang dilantik, sebagian merupakan anggota lama (incumbent), yakni 29 orang.

Ketua Sementara DPRD DIY Nuryadi SPd mengemukakan, pandemi Covid-19 menjadi pengalaman yang berharga. Untuk melakukan rapat mengambil keputusan politik, menga-



KR-Dok DPRD DIY

Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD DIY Nuryadi dan Budi Waljiman saat memimpin rapat paripurna.

lami kesulitan.

Salah satu keputusan politik yang penting dalam mengatasi persoalan tersebut, yakni membuat Peraturan Daerah (Perda). Dengan semangat dan kemauan keras para anggota, akhirnya pembahasan Perda bisa terealisasi. "Sampai selesai periode ini, kita tidak punya utang (pembuatan Perda)," ujar Nuryadi.

Ke depan, untuk periode 2024-2029, Nuryadi yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD DIY dari PDI Perjuangan ini yakin rekan-rekannya berkinerja lebih baik. "Memang saat ini banyak muka-muka baru. Namun mereka yang baru ini, memiliki banyak pengalaman sebelumnya, meski di luar legislatif," ujar Nuryadi.

Pengalaman yang banyak ini, menjadi bekal berharga nantinya dalam berbagai pembahasan menyangkut rakyat dan pemerintahan. "55 anggota dewan ini saya yakin memiliki tekad yang sama memajukan DIY ke depan," ujarnya.

Sebagai Ketua Sementara DPRD DIY, Nuryadi akan berusaha mengh-

tarkan para anggota membentuk fraksi dan membentuk tata tertib. Sekaligus juga terpilihnya ketua definitif DPRD DIY.

Pergantian periode pengabdian, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjalankan amanah rakyat.

Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai daerah yang kaya akan sejarah dan budaya memiliki berbagai tantangan dan peluang yang perlu perhatian khusus. (*)-d



KR-Dok DPRD DIY

Usai dilantik dan diambil sumpah anggota DPRD DIY dari sejumlah partai politik berfoto bersama di depan Gedung DPRD DIY.

55 Anggota DPRD DIY Periode 2024-2029

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

RB Dwi Wahyu B, SPd, Msi
Imam Priyono D Putranto, SE, Msi
Eko Suwanto, SE, Msi
Tustiyani, SH
H Ispriyatun Katir Triatmojo
Andriana Wulandari, SE
D Radjut Sukasworo
Fajar Gegana, ST
Akhid Nuryati, SE
Reda Refitra S
Dr Hj Yuni Satia Rahayu, SS MHum
Koeswanto, SIP
Yan Kurnia Kustanto, SE
Haris Sugiharta, SIP
Dra Rita Nurmastuti, MPd
Sukapdi Nuryadi, SPd
J. Arga Seloka
Demas Kursiswanto, AMd

Partai Gerindra

Budi Waljiman, SH

Nur Subiyantoro, SiKom
Dr Danang Wahyu Broto, SE, Msi
Ika Damayanti FN, SIP
Anton Prabu Semendawai SH, MKn
M Lisman Pujakusuma, SP
Purwanto, ST
Didik Kuswanto

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Muhammad Syafi'i, SPsi
Amir Syarifudin
H Sigit Nursyam Priyanto, SSI, MEcDev
Muh Ajrudin Akbar, SSosI
Sofyan Setyo Darmawan, ST MEng
Basit Sugiyanto, SE MM
Ir Imam Taufik

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Dr Aslam Ridlo, MAP
Umaruddin Masdar, SAg
Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA
Rahayu Widi Nuryani, SH MH
Tri Nugroho, SE
Timbul Suryanto

Partai Golkar

Drs H Suwardi
Arni Tyas Palupi, ST
Lilik Saiful Ahmad, SP
Dra Hj Sri Muslimatun, MKes
Agus Sumaryanto, ST
Syarif Guska Laksana, SH

Partai Amanat Nasional (PAN)

Rifki Listianto, SSI MSC
Wildan Nafis, SE, MH
Arif Kurniawan, SAg
Raden Inoki, AP
Arif Setiadi, SIP

Partai Nasdem

Suharno, SE
Ismail Ishom

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

H Muhammad Yazid SAg

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Dr Stevanus Christian Handoko, SKom MM

Simak juga wawancara di :

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat
@Krdjogdotcom



TikTok
KedaulatanRakyat
Kedaulatan rakyat Media

